BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Masyarakat Nelayan

2.1.1 Pengertian Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Mulyadi, 2007). Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses pasar (Siswanto, 2008).

nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2007).

2.1.2 Kelompok Masyarakat Nelayan

Menurut Charles (2001), kelompok nelayan dapat dibagi empat kelompok yaitu

- 1) Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- 2) Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- 3) Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk kesenangan atau berolah raga.
- 4) Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Disamping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan; juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan anak buah kapal yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan. (Widodo dan Suadi, 2006).

2.2 Konsep Pemberdayaan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membentuk masyarakat yang berdaya dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada mereka (Sulistiyani, 2004). Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara sengaja yang berpusat terhadap masyarakat lokal di suatu wilayah dengan melibatkan mutual *respect*, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi secara kelompok demi mengatasi hambatan sumber daya yang sedang terjadi (Suwandi & Prihatin, 2020).

Pemberdayaan bukan hanya memberikan bantuan kepada masyarakat, akan tetapi lebih kepada memberdayakan kelompok masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi persoalan yang sedang terjadi. Hal tersebut dapat terwujud dengan cara membuka akses terhadap sumber-sumber ekonomi sekaligus politik (Usman, 2006). Pemberdayaan dapat memberikan dorongan yang baik untuk membangun kekuatan dari dalam sehingga muncul solusi yang lebih tepat sasaran dengan upaya sendiri dan kelompok masyarakat tidak hanya menjadi penerima resep secara eksternal. Sumber daya yang dikelola oleh pihak eksternal justru akan memberikan dampak degradasi yang merugikan pihak internal (Hastuti dkk., 2017).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*people centered*", *participatory*, *empowering*, and *sustainable* (Chambers, 1995). Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris

"*empowerment*", yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). *Empowerment aims to increase the power of disadvantaged*, demikian menurut Jim Ife (2002). Jadi, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang tidak beruntung. Sementara, Swift dan Levin mengungkapkan pemberdayaan menunjuk pada usaha "*reallocation of power*" melalui perubahan sosial. Rappaport menjelaskan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 2005). Mayo & Craig (1995) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep: kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan terhadap nelayan adalah upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dengan melakukan pendekatan untuk membuat perubahan yang dikenal sebagai upaya pemberdayaan nelayan. Dalam hal ini kelompok masyarakat yang terlibat memiliki pengaruh penting demi terwujudnya kesejahteraan yang sedang dituju. Kelompok masyarakat menjadi salah satu manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan melalui pemberdayaan serta berperan langsung terhadap pengelolaan lingkungan agar tujuan lebih cepat tercapai (Reid, 2004).

Pendekatan yang banyak dipakai saat ini untuk membuat perubahan tersebut adalah pemberdayaan. Pemberdayaan bukan hanya memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi juga harus berupa upaya untuk memberdayakan mereka

(kelompok miskin) sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi sekaligus politik (Usman 2006). Pemberdayaan ini memberikan dorongan untuk membangun kekuatan dari dalam yang mampu melahirkan solusi yang lebih tepat sasaran dengan upaya sendiri dan bukan hanya sebagai penerima resep dari eksternal (Rohmin, 2008).

Sumber daya yang dikelola penuh oleh pihak eksternal cenderung menghasilkan degradasi lingkungan yang justru malah merugikan (Hastuti, 2017). Oleh karena itu, peran masyarakat menjadi penting dalam pemberdayaan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan. Peran masyarakat dapat diamati dari kelompok-kelompok yang ada. Kelompok masyarakat menjadi salah satu manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan melalui pemberdayaan. Kelompok masyarakat juga memiliki peran penting terkait tata kelola lingkungan agar dapat berhasil membentuk sistem pengelolaan lingkungan yang baik (Reid, 2004).

2.2.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Abidin, 2017).

Upaya pemberdayaan perlu melalui beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) dalam Endah (2020) terdapat tiga tahapan dalam proses pemberdayaan, yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan. Penyadaran menjadi tahap pertama yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) dalam Endah (2020) ada 3 tahapan pemberdayaan diantaranya yaitu: 1) penyadaran, tahap penyadaran masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan; 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan; 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian.

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) sosial-ekonomi dan politik. Hurairah (2025) mengungkapkan proses pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai "*power*" (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Secara konseptual, menurut Saraswati (1997) pemberdayaan harus mencakup enam hal:

1. *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
2. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3. *Self-evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self-development and coordination*. Artinya, mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self-selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
6. *Self-decision*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-decision*).

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengaruh yang ditimbulkannya semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya (snowball) (Hurairah, 2025).

2.2.4 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat, (2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan, (3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan (4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama (Kusnadi, 2009).

2.3 Potensi Lokal

2.3.1 Pengertian Potensi Lokal

Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat (Endah, 2020). Potensi juga dapat diartikan sebagai peluang yang menjanjikan untuk bisa dikembangkan baik itu dalam bentuk kekuatan, kesanggupan, dan daya yang bisa di kembangkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya. Untuk memperkuat makna potensi lokal dari pernyataan sebelumnya, Soleh (2017) menambahkan jika potensi lokal adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Aspek-Aspek Potensi Lokal

Selanjutnya menurut Soleh (2017) juga menambahkan, secara garis besar potensi lokal dapat dibedakan menjadi dua, pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, kedua adalah potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga- lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Menurut Soetomo (2014) diperlukan paling tidak tiga hal dalam mengidentifikasi potensi lokal yaitu :

1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat.
2. Identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang

- mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumberdaya yang ada;
3. Proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia

2.4 Kemandirian Masyarakat

2.4.1 Pengertian Kemandirian Masyarakat

Kemandirian masyarakat sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk berfikir, kemudian memutuskan dan menjalankan sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat sendiri. Dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berpikir, bersikap dan berperilaku untuk berubah dan maju. Pemberdayaan bukan saja difokuskan pada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian, sehingga perlu dikembangkan serta digali potensi yang dimiliki masyarakat (Endah, 2020).

Dalam konteks kemandirian Pusposari, dkk (2019) menyatakan jika peran negara diperlukan tidak hanya sebagai wasit alias penjaga malam, melainkan negara juga harus membantu kelompok masyarakat kecil menengah supaya memiliki kemampuan bersaing di pasar secara adil. Pada dasarnya kelompok masyarakat seperti inilah yang mampu menopang kekokohan perekonomian suatu bangsa.

Pengembangan komunitas bertujuan untuk mencapai kemandirian (*self-reliance*), sebagaimana ditegaskan Sunyoto Usman (Jamasy, 2004) bahwa

pemberdayaan adalah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. (Sulistiyani, 2004) mengungkapkan bahwa kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Mut'adin (2002) menyatakan kemandirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih mantap. Kemandirian (*self-reliance*) adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep ini program-program pembangunan dan pemberdayaan dirancang secara sistematis agar individu atau pun masyarakat menjadi subjek dari pemberdayaan tersebut (Hurairah, 2025).

2.4.2 Bentuk Kemandirian Sosial

Kemandirian sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia, yang mengacu pada kemampuan individu untuk hidup mandiri dalam masyarakat tanpa ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Menurut Hurairah (2011), kemandirian sosial adalah kondisi ketika individu mampu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta menjalankan tanggung jawab sosialnya secara bebas dan bertanggung jawab. Ini mencerminkan kemampuan

seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan tetap mampu menjaga nilai-nilai sosial serta jati dirinya.

Proses terbentuknya kemandirian sosial berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, pengalaman hidup, serta interaksi sosial. Individu yang memiliki kemandirian sosial akan terlihat dari kemampuannya membangun hubungan interpersonal yang sehat, memiliki sikap toleran, dan mampu berperan aktif dalam komunitas sosialnya dalam menunjukkan inisiatif dalam menghadapi tantangan sosial serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal (Hurairah, 2011).

Bentuk-bentuk kemandirian sosial sangat beragam. Pertama, kemandirian emosional, yakni kemampuan individu dalam mengelola perasaan dan emosi secara sehat tanpa harus terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Kedua, kemandirian ekonomi, yang tercermin dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri melalui usaha atau pekerjaan. Ketiga, kemandirian dalam pengambilan keputusan, di mana individu memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri dengan tetap mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku.

Kemandirian dalam hubungan sosial juga menjadi indikator penting. Menurut Santrock (2007), individu yang mandiri secara sosial mampu menjalin relasi yang sehat, resiprokal, dan saling menghargai tanpa bergantung secara psikologis pada pihak lain. Dalam jangka panjang, kemandirian sosial akan menunjang pembentukan masyarakat yang partisipatif, inklusif, dan berdaya.

2.4.3 Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan diyakini sebagai salah satu bidang yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Bahkan menjadi faktor dominan di dalam proses peningkatan kecerdasan bangsa. Betapa penting dan strategis peranan pendidikan di dalam pembangunan bangsa, hal tersebut telah diakui sejak dirumuskannya UUD 1945. Tanpa bangsa yang cerdas tidak mungkin bangsa itu ikut serta dalam percaturan global. Secara umum, terdapat dua orientasi pendidikan dalam pembangunan bangsa, yaitu orientasi individual dan orientasi masyarakat. Orientasi individual, pendidikan berperan dalam pembentukan insan terdidik (*educated person*) yaitu melalui proses pengembangan potensi diri (Hidayah dkk., 2023).

Kemampuan yang dimiliki oleh insan terdidik merupakan sarana bagi pemahaman diri dan lingkungan, upaya adaptasi dan partisipasi dalam perubahan, pelaku utama bagi perubahan (*innovator*), dan memiliki orientasi prediktif dan antisipatif. Dengan demikian, manusia terdidik dapat menjadi anutan bagi yang lainnya (*reference behavior*) dan memiliki andil dalam membangun masyarakat (*society building*). Untuk itu, manusia terdidik harus memiliki keunggulan partisipatif bagi terwujudnya transformasi sosial yang menyeluruh. Sedangkan orientasi masyarakat, pendidikan memiliki tiga peran utama yakni sebagai agen konservatif (*agent of conservation*), agen inovatif (*agent of innovation*), dan agen perubahan (*agent of change*). Sebagai agen konservatif, pendidikan secara operasional praktis melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya asli (*indigeneous*) yang memiliki ketangguhan dan ketahanan (*homeostatic*) (Ningrum, 2016).

Dengan demikian, masyarakat akan memiliki jati diri dalam menyikapi arus globalisasi. Sebagai agen inovatif, pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, mensosialisasikan, dan mengaplikasikannya. Melalui perannya tersebut, pendidikan akan menghasilkan masyarakat pembelajar (*learning society*) yang diekspresikan dengan gemar mencari informasi, menggunakan, dan mengkomunikasikannya. Sedangkan sebagai agen perubahan, pendidikan memiliki konsekuensi terhadap aplikasi dari produk inovasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi katalisator bagi terjadinya transformasi sosial (Hidayah dkk., 2023).

Pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif bagi terjadinya perubahan. Dengan beberapa peran yang dimilikinya tersebut, pendidikan dituntut memiliki sumber daya pendidikan untuk mempersiapkan pelaku-pelaku perubahan yang tangguh, unggul, partisipatif, dan kompetitif. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana (UURI No. 20 Tahun 2003). Selanjutnya dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, dalam pembahasan ini, tenaga kependidikan dipakai istilah sumber daya manusia pada bidang pendidikan (Sunarsi, 2018).

Pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konstelasi tulisan ini, pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pengembangan. Untuk itu, maka pendidikan

memerlukan SDM yang kompeten sebagai aset bagi proses pengembangan dan SDM yang kompeten tersebut dicapai melalui proses pengembangan. Dengan demikian, SDM menjadi bagian penting dalam pengembangan dan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen saling yang saling terkait secara fungsional bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas (Ningrum, 2016).

Setidaknya terdapat empat komponen utama dalam pendidikan, yaitu: SDM, dana, sarana, perasarana, dan kebijakan. Komponen SDM dapat dikatakan menjadi komponen strategis, karena dengan SDM berkualitas dapat mendayagunakan komponen lainnya, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pendidikan (Fukuyama 1991). Di mana SDM berkualitas dapat dicapai dengan pengembangan SDM. Pengembangan adalah upaya meningkatkan sesuatu agar lebih bertambah baik. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan (Ruhana 2012).

Seperti dikemukakan Sikula (1981): *development in reference to staffing and personnel matters, is a long term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personel learn conceptual and theoetical knowledge for general purpuses. Training is a short term educational process utilizing a systematic and orgenized procedure by which nonmanagerial personnel learn technical knowledge and skill for a definite purpose.*

Selain itu, Hasibuan (2007) mengemukakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan

dan latihan. Pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja, baik secara teknis maupun manajerial. Dimana, pendidikan berorientasi pada teori dan berlangsung lama, sedangkan latihan berorientasi pada praktek dengan waktu relatif singkat (Suryani & Rindaningsih, 2023).

2.5 Kesejahteraan Sosial

2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Zastrow, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasi. Kesejahteraan sosial adalah upaya untuk membantu orang yang membutuhkan barang dan jasa yang tidak dapat mereka sediakan sendiri. Kesejahteraan sosial juga dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial mencakup Kesehatan, Keadaan ekonomi, Keterampilan, Kualitas hidup. Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, Sumber pendanaan Zastrow (2008) yang di kutip dari buku (Adi Fahrudin, 2012:67).

Nasikun (2013) menyampaikan rumusan kesejahteraan sebagai padanan dari makna konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 indikator diantaranya: 1. Rasa aman (*Security*), 2. Kesejahteraan (*Welfare*), 3. Kebebasan (*Freedom*), 4. Jati diri (*Identity*). Selain itu ada indikator lain yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan, yaitu tingkat pendapatan setiap keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan di masyarakat, tingkat layanan dan jaminan kesehatan, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimilikinya (Lamber dkk., 2022).

Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna "kondisi" menurut UU No 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai "sistem organisasi" yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kesejahteraan sosial sebagai sebuah "gerakan/aktivitas", pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (*well-being*) agar dapat bersaing dan berkelanjutan hidup di masyarakat (Suharto, 2006).

Dari ketiga arti tersebut, makna kesejahteraan sosial tidak hilang begitu saja tetapi ada salah satu arti atau makna lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dan pembangunan bangsa saat ini. Arti yang keempat itu adalah "ilmu/*science*". Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya seperti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dll (Husna, 2014).

2.5.2 Pekerjaan Sosial

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-

teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya (Miftahul, 2009).

Pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan (Husna, 2014). Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai) (Zastrow, 1999). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik (Astri, 2013).

Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human wellbeing*) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting (Husna, 2014).

2.5.3 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan Pekerjaan sosial menurut Rukminto, (2013:18), dalam bukunya menerangkan sebagai berikut: “Mempromosikan terciptanya perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik”. Tujuan pekerjaan sosial menurut Zastrow (2008) dalam Fahrudin, (2012:67) adalah :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
3. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya dan bermacam-macam.

2.6 Peneliti Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya

NO	Komponen	Keterangan
1	Nama Penulis	Arisandi, D. M., Guntur, G., Supriyadi, S., Wardani, M. P., Amrillah, A. M., & Salam, B. F. (2021)..
	Judul Artikel	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Berbasis Potensi Lokal Melalui <i>Fish Smoking Technology</i> Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur
	Nama Jurnal	<i>Journal of Innovation and Applied Technology</i> . Vol 7(2). 1220-1228.
	Metode	<i>Participatory Rural Appraisal</i>
	Hasil	Program PPTTG telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Kelompok Nelayan Mina Bina Lestari dan Mina Asri di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam penerapan metode/cara fish smoking technology. 2. Pelatihan kemasan dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan meningkatkan nilai jual produk ikan asap. 3. Adanya keinginan yang kuat dari kelompok nelayan untuk memanfaatkan teknologi tepat guna pengasapan ikan sebagai alternatif mata pencaharian dimasa yang akan datang.
	URL	https://jiat.ub.ac.id/
	Persamaan	Pemberdayaan nelayan
	Perbedaan	Metode penelitian dan metode pemberdayaan
2	Nama Penulis	Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019).
	Judul Artikel	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara).
	Nama Jurnal	<i>Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis</i> , 2(2), 118-140.
	Metode	Deskriptif Kualitatif

NO	Komponen	Keterangan
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan alat tangkap dan boat, melakukan sosialisasi cara penggunaan alat tangkap dan mekanisme pemberian bantuan, dilihat dari strategi sudah baik akan tetapi terkendala dikarenakan kurangnya fasilitas bantuan yang diberikan, kurangnya Sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan kepada para nelayan sehingga bantuan yang diberikan tidak merata dan tidak efisien. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Melihat dari strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang diberikan oleh pemerintah masih kurangnya fasilitas bantuan, kurangnya Sumber daya manusia dan pengawasan yang diberikan kepada para nelayan sehingga bantuan yang diberikan tidak merata kepada semua kelompok nelayan, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Adapun saran dari peneliti yaitu pemerintah dapat memberikan bantuan baik barang (peralatan nelayan) juga pemberian modal usaha.
	URL	https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062
	Persamaan	Study kasus pada pemberdayaan nelayan
	Perbedaan	Metode pemelitan
3	Nama Penulis	Hermawan, A. R. (2019).
	Judul Artikel	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
	Nama Jurnal	<i>Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.</i>
	Metode	Deskriptif Kualitatif (<i>post positivisme</i>)
	Hasil	Kendala yang dihadapi masyarakat dalam kelompok masih ada yang belum bisa mengajukan permohonan dalam bentuk proposal, masih secara lisan tanpa rincian, sehingga akan menghambat proses pengembangan usaha masyarakat/kelompoknya, dikarenakan juga masyarakat belum memahami bahwa pemerintah desa membutuhkan RAP secara tertulis sebagai bukti pertanggung jawaban atas pembiayaan yang dikeluarkan untuk menunjang proses pemberdayaan harus tertib administrasinya. Maka sarannya adalah untuk diberikannya pelatihan tentang sistem dalam membuat permohonan berbentuk proposal tertulis sebagai alat penunjang dan diberikan wawasan tentang mekanisme struktural agar masyarakat bisa lebih bertambah secara pengetahuan, sehingga pemerintah desa tidak terasa repot dalam memimpin masyarakat yang majemuk.
	URL	https://repository.radenintan.ac.id/6391/
	Persamaan	Pemberdayaan dalam fokus kemandirian masyarakat nelayan
No	Komponen	Keterangan
	Perbedaan	Metode penelitian
4	Nama Penulis	Hatu, R. A., Yunus, R., & Mozin, N. (2023).
	Judul Artikel	Pemberdayaan Nelayan Berbasis Lembaga Mediator Kontrol Dalam Upaya Pencegahan Illegal Fishing.
	Nama Jurnal	<i>BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat</i> . Vol. 4(1). 267-277.
	Metode	Deskriptif Kualitatif dengan observasi serta wawancara

	Hasil	Dalam kurun waktu 58 hari kegiatan pengabdian masyarakat KKN Kolaboratif Universitas Negeri Gorontalo - Universitas Gadjah Mada di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang telah terlaksana antara lain : (1) Program Belajar Bersama Anak Pesisir, (2) Pendampingan bimbingan konseling anak pesisir, (3) Pencanaan dusun sehat wilayah pesisir, (4) Sosialisasi pengembangan UMKM (Rempeyek Ikan Teri), (5) Sosialisasi dan Pembuatan resapan air (Biopori), (6) Penyuluhan/sosialisasi hukum tentang bahaya illegal fishing pada masyarakat nelayan serta membuat satu produk hukum berupa Surat Keputusan pembentukan Lembaga mediator
	URL	https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4021
	Persamaan	Pemberdayaan nelayan
	Pernedaan	Metode penelitian dan metode pencegahan nelayan ilegal
5	Nama Penulis	Windasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021).
	Judul Artikel	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

	Nama Jurnal	<i>Jurnal Inovasi Penelitian</i> . Vol. 2(3). 793-804.
	Metode	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Sumenep khususnya di bidang perikanan tidak sepenuhnya maksimal dalam segi pemberdayaan. hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu yang pertama, pengembangan sumberdaya manusia, dimana dalam hal pengembangan sumberdaya manusia pemerintah melalui pemberian pelatihan dan pembinaan, untuk Kepulauan Masalembu dalam hal pemberian pelatihan dan pembinaan masih belum terealisasi. Kedua, pengembangan sarana dan prasarana dalam hal ini pemerintah melalui pemberian bantuan, dalam pemebrian bantuan masyarakat terlebih dahulu mengajukan proposal. Ketiga pembentukan kelembagaan nelayan dimana kelembagaan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat nelayan dan mempermudah pemerintah dalam mengkoordiner masyarakat nelayan. 2. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu, pertama kurangnya sumberdaya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten sumenep, sehingga terdapat program yang masih tidak terealisasi di Kepulauan Masalembu. Kedau, terbatasnya anggaran yang diberikan menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah dirancang. Ketiga, kurangnya teknologi, di Kepulauan masalembu untuk teknologi masih sangat minim, seperti halnya jaringan internet yang masih tidak ada, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu.
	URL	https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/764
	Persamaan	Pemberdayaan nelayan dalam fokus kelembagaan nelayan
	Perbedaan	Metode penelitian dan keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan nelayanm
6	Nama Penulis	Halil, H. (2022).
	Judul Artikel	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
	Nama Jurnal	<i>Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat</i> . Vol. 1(2). 99- 112.
	Metode	Deskriptif Kualitatif

Hasil	Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis ekonomi kreatif telah menunjukkan bahwa 1) Proses pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dilakukan melalui kegiatan pembuatan produk-produk ekonomi kreatif yang ada di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang meliputi tahapan pelaksanaan. 2) Terdapat potensi SDA, SDM, dan Potensi Usaha di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terbukti masyarakat mampu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal. 3) Dengan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, maka memudahkan untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat, seperti kelompok nelayan, gapoktan, dan lainnya. 4) Partisipasi masyarakat terjadi dengan diberikannya penyadaran-
-------	---

		penyadaran. 5) Pelatihan sudah diberikan bahkan dalam 1 tahun 4-5 kali mendapatkan pelatihan.
	URL	https://doi.org/10.47766/ibrah.v1i2.1024
	Persamaan	Pemberdayaan nelayan dan potensi kelompok usaha bersama
	Perbedaan	Metode penelitian
7	Nama Penulis	Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020).
	Judul Artikel	Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia.
	Nama Jurnal	<i>JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik</i> , 10(2), 231-255.
	Metode	deskriptif-kualitatif
	Hasil	Tahapan penyadaran dalam KUB Berkah Samudera ini dinilai dari aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Anggota kelompok secara umum sudah memiliki pengetahuan yang baik sehingga mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya bahkan beberapa mampu untuk melakukan evaluasi. Terkait sikap, secara umum anggota dapat bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Terkait aspek tindakan, secara umum mereka sudah pada tingkat adopsi di mana pengetahuan tersebut juga diturunkan kepada keluarga sehingga kegiatan pemberdayaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat berlanjut. Dalam peningkatan kapasitas, KUB Berkah Samudera melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu anggotanya meningkatkan pendapatan, melakukan pembagian peran dan fungsi dalam kelompok, dan melembagakan kegiatan kelompok sehingga memiliki landasan hukum yang jelas yang akan meningkatkan daya tawar dari kelompok sendiri.
	URL	https://journal.uinsgd.ac.id/
8	Nama Penulis	Nugroho, M. (2021).
	Judul Artikel	Pemberdayaan masyarakat nelayan di kabupaten Pasuruan: kajian pengembangan model pemberdayaan sumberdaya manusia di wilayah pesisir pantai.
	Nama Jurnal	<i>Teknologi Pangan: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian</i> , 6(1).
	Metode	action research, dengan fokus (1) pola hidup nelayan (kondisi sosial, ekonomi dan budaya); (2) modal usaha yang dimiliki nelayan dan (3) konsepkebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan

		dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan; (3) konsep kebijakan pengembangan ekonomi produktif usaha pengolahan hasil perikanan yang berkelanjutan, dengan metode pelatihan dan pendampingan keluarga nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
	URL	https://doi.org/10.35891/tp.v6i1.464
	Persamaan	Pemberdayaan nelayan khususnya dalam potensi kelompok usaha bersama
	Perbedaan	Metode penelitian
9	Nama Penulis	Pusposari, L. F., Umamah., Shofiyah, S., & Dwi, C. (2019).
	Judul Artikel	. Pemberdayaan Masyarakat Berorientasi Kemandirian (Studi Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)
	Nama Jurnal	<i>Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial</i> , 2(1), 42 – 62.
	Metode	Deskriptif Kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus (<i>case study</i>)
	Hasil	Strategi yang dilakukan MDW dalam program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Camplong adalah sebagai berikut: 1). Melakukan PRA (Participatory Rural Appraisal) dan mapping social; 2). Melakukan jaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui usulan-usulan dari masyarakat; 3). Menentukan sasaran/kelompok yang berpotensi menjadi kelompok binaan; 4). Koordinasi dengan kepala desa dan melibatkan pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 5). Mensosialisasikan program pemberdayaan dengan tujuan agar sasaran atau penerima manfaat mengetahui peruntukan modal, mekanisme kerja dari pengelolaan bantuan; 6). Mengadakan pelatihan teknis sesuai dengan usaha yang ditekuni kelompok pengrajin dan pelatihan manajemen meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan wirausaha; 7). Melakukan pendampingan; 8). Melakukan monitoring kemajuan usaha dari kelompok pengrajin
	URL	https://Doi.10.18860/Jpips.V2i1.6838
10	Nama Penulis	Wiber, M., Charles, A., Kearney, J., & Berkes, F. (2023).
	Judul Artikel	Enhancing community empowerment through participatory fisheries research.
	Nama Jurnal	<i>Marine policy</i> , 33(1), 172-179.
	Metode	Kualitatif <i>Participatory</i>
	Hasil	Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam pengelolaan perikanan, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara analisis politik dan strategi keterlibatan dengan kekuasaan lokal. Hal ini menuntut pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga sensitif terhadap dinamika kekuasaan yang berlangsung di tingkat komunitas. Analisis politik dalam konteks ini mencakup pemahaman terhadap siapa yang memiliki otoritas, bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan, serta sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kerangka politik yang lebih luas, karena relasi kuasa sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pemberdayaan.
	URL	https://doi.10.1016/j.marpol.2008.05.009
	Persamaan	Pemberdayaan masyarakat nelayan
	Perbedaan	Metode Penelitian dan teknik pengumpulan data

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Peneliti menggunakan 10 jurnal yang terindeks secara kredibel sebagai *state of art* yang melandasi penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memiliki perbedaan dan persamaan penelitian yaitu yang pertama menurut Penulis Ariandi D. M., dkk (2021) yaitu tentang metode penelitian dan metode pemberdayaan yang dimana penelitian tersebut menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* dan untuk persamaannya yaitu membahas tentang pemberdayaan nelayan. Perbedaan menurut Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019) penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh pemerintah dengan cara memberikan alat tangkap dan boat sedangkan untuk persamaannya yaitu menggunakan pendekatan study kasus dalam pemberdayaan nelayan.

Perbedaan menurut Hermawan, A. R. (2019) penelitian ini membahas tentang Kendala yang dihadapi masyarakat dalam kelompok kelompok nelayan sedangkan untuk persamaannya yaitu tentang pemberdayaan dalam fokus kemandirian nelayan. Perbedaan menurut Hatu, R. A., Yunus, R., & Mozin, N. (2023) yaitu tentang metode penelitian dan metode pencegahan nelayan illegal sedangkan persamaannya yaitu tentang pemberdayaan. Perbedaan menurut Windasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021) tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Nelayan sedangkan untuk persamaannya yaitu pemberdayaan nelayan yang berfokus pada kelembagaan nelayan.

Perbedaan menurut Halil, H. (2022) tentang pemberdayaan Masyarakat berbasis ekonomi sedangkan persamaannya yaitu tentang kelompok usaha bersama. Perbedaan menurut Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020) tentang membangun keberdayaan nelayan dengan tahapan penyadaran dalam KUB sedangkan untuk persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan

menurut Nugroho, M. (2021) yaitu membahas tentang teknologi pangan seperti media informasi dan komunikasi ilmiah teknologi sedangkan persamaannya yaitu pemberdayaan nelayan.

Perbedaan menurut Pusposari, L. F., Umamah., Shofiyah, S., & Dwi, C. (2019) yaitu membahas tentang strategi yang dilakukan MDW dalam program pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus untuk mempermudah peneliti untuk mencari informasi yang valid. Perbedaan menurut Wiber, M., Charles, A., Kearney, J., & Berkes, F. (2023) membahas tentang metode penelitian dan Teknik pengumpulan data sedangkan untuk persamaannya yaitu pemberdayaan masyarakat nelayan.